



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUMARIL
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 99768

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.160.000.000

1. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/170 m2 di KAB / KOTA
LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 399.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA-R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA DYNA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 114.515.990**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 133.009.827



F. HARTA LAINNYA	Rp.	11.084.954
Sub Total	Rp.	1.817.610.771
III. HUTANG	Rp.	748.733.547
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.068.877.224

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.